RENCANA KERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
JLN. LINTAS GUNUNGTUA – LANGGA
PAYUNG KM. 5 GUNUNGTUA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, Tim Penyusun Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara telah selesai menyusun RENJA Tahun 2024. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 memuat program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara disusun dengan berpedoman kepada Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB).

Sehubungan dengan adanya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmedagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara menyesuaikan pemetaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan urusan Pemerintah Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam fungsinya memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat.

Penyusunan Renja ini masih jauh dari sempurna, masih terdapat kelemahan, maka dengan rendah hati mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan lebih lanjut serta agar dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan 1 (satu) tahun ke depannya.

Gunungtua, 31 Agustus 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

MUHAMMAD ALI HASIBUAN, S.Sos
NIP. 19720512 199203 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……			**i**
DAFTAR ISI……			**ii**
BAB I	**PENDAHULUAN ……**		**1**
	1.1	Latar Belakang …….....	1
	1.2	Landasan Hukum …….....	2
	1.3	Maksud dan Tujuan …….....	4
	1.4	Sistematika Penulisan …….....	5
BAB II	**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU …..…….....**		**8**
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Restra OPD……..	8
	2.2	Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD……..…….....	15
	2.3	Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD……..	15
	2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	16
	2.5	Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	26
BAB III	**TUJUAN DAN SASARAN OPD…….....**		**28**
	3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..……..……	28
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja……..……	28
	3.3	Program dan Kegiatan……	29
BAB IV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..**		**42**
BAB V	**PENUTUP…….....**		**43**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tauan 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang. Salah satunya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Bupati yang habis masa jabatannya tahun 2023 menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis tiga tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang lebih operasional.

Pembangunan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk membangun kualitas data base Kependudukan guna menjamin legalitas dokumen Kependudukan yang meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Akta-Akta Pencatatan Sipil maupun surat keterangan Kependudukan lainnya. Data base Kependudukan yang berkualitas dijadikan sebagai dasar dalam perumusan berbagai kebijakan dan program pembangunan sehingga kegiatannya lebih tepat sasaran dan mampu menjambatani pemenuhan prioritas kebutuhan riil masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 ini selaras dengan isu-isu stategis yang berkembang dimasyarakat serta berdasarkan Amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administasi Kependudukan.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Lawas Utara juga sebagai dasar pengusulan program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Provinsi dan APBN.

Selanjutnya agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran belanja dapat berhasil dengan baik maka perlu disusun perencanaan yang baik dan matang dengan mempertimbangkan keadaan yang ada serta memprediksi kondisi yang akan terjadi dengan berbagai dukungan dan potensi yang dimiliki serta hambatan-hambatan yang mungkin timbul.

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 ini mengacu pada :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103);
3. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nobor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Reancana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalrifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;

14. Instrumen Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013 Nomor 440, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 54);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12 Tahun 2019 tetang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
19. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 32 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara.
20. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026; dan
21. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 57 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara adalah untuk mengetahui arah pelaksanaan pembangunan daerah serta acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk usulan program dan kegiatan skala prioritas yang memuat rencana kerja tahunan, kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD dalam penyusunan RPD Kabupaten Padang Lawas Utara.

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara ditetapkan dengan maksud memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja angaran (RKA) tahun 2024.

Tujuan disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) tahun 2024, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dan hasil dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Latar belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antar Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum memuat penjelasan tentang Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiaraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun – tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator yang sudah ditentukan dalam Renstra. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing – masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan Perundang – undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing – masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3 Isu – isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD,
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD,
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian Program Nasional,
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD, dan
5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan RKPD dengan hal analisis kebutuhan, serta mengenai alasan proses tersebut dilakukan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penjelasan tentang proses bagaiman usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh, serta penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu – isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan OPD berisi tentang Rencana Kerja Pendanaan Organisasi OPD.

BAB V : PENUTUP

Berisikan tentang kaidah-kaidah pelaksanaan rencana tindak lanjut serta catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adalah evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2023 (Triwulan II tahun 2023). Pada tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara melaksanakan sebanyak 4 (empat) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD tahun 2023 sejumlah Rp 4.019.387.149,-. Dalam pelaksanaannya, program tersebut masih berjalan dan telah terselesaikan sebesar 62,83% dengan realisasi anggaran Rp 2.525.380.946,-.

Pelaksanaan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 yang mendukung Visi Misi Bupati sebagai berikut :

1. Program Pendaftaran Penduduk

   Program Pendaftaran Penduduk dengan indikator kinerja Persentase Cakupan Dokumen Kependudukan dengan target 74% realisasi 64,24% dengan capaian 86.81% dengan penjabaran sebagai berikut :

   a. Cakupan Perekaman KTP elektronik dengan target 98% realisasi 96,52% dengan capaiannya 98,49%, dan

b. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA dengan target 50% realisasi 31,96% dengan capaiannya 63,92%.

2. Program Pencatatan Sipil

   Program Pencatatan Sipil dengan indikator kinerja Persentase cakupan Dokumen Pencatatan Sipil dengan target 97% realiasi 93,61% dengan capaian 96,50%, penjabaran dari indikator program ini adalah Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran denga target 97% realiasai 93,61% dengan capaiannya 96,50%.

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

   Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator kinerja Persentase Pemanfaatan Data Informasi Administrasi Kependudukan dengan target 100% realiasi 100% dengan capaian 100%, penjabaran dari indikator program ini adalah Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kinerja dengan target 5 OPD realisai 5 OPD sehingga tercapai 100%.

Berikut Tabel 2.1 hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Triwulan II tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Disdukcapil dan
Pencapaian Renstra Disdukcapil 2019 s/d 2023
Kabupaten Padang Lawas Utara

No	Sasaran	Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d SKPDTahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja Capaian Kinerja yang di Evaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANA																					
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																					
1	â€¢ Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dengan Indikator Pembangunan Yakni Predikat Akuntabilitas Kinerja	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota					815.305.800		117.030.085		-		0		0		333.527.482		35,33 %	81,88%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
11		2.12.01.1	"Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah "	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja					3	8.801.000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0,00%	0,00%	

1.1.1		2.12.01.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					3	8.801.000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0,00%	0,00%	
12		2.12.01.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0%	0%	
13		2.12.01.4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-					12	154.440.000	2	25740000	3	36.750.000	0	0	0	0	5	62.490.000	41,67 %	40,46%	
1.3.1		2.12.01.4.1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12	154.440.000	2	25.740.000	3	36.750.000	0	0	0	0	5	62.490.000	41,67 %	40,46%	
14		2.12.01.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					962	125.048.800	3	39615900	953	43.059.800	0	0	0	0	956	82.675.700	63,33 %	73,14%	
1.4.1		2.12.01.3.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					3	3.743.200	0	935.000	0	65.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00%	26,72%	
1.4.2		2.12.01.3.8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4	86.789.400	1	20.985.900	1	30.648.800	0	0	0	0	2	51.634.700	50,00 %	59,49%	
1.4.3		2.12.01.3.9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					3	21.814.200	1	14.119.000	1	3.220.000	0	0	0	0	2	17.339.000	66,67 %	79,48%	
1.4.4		2.12.01.3.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					950	5.550.000	0	0	950	5.550.000	0	0	0	0	950	5.550.000	100,00%	100,00%	

1.4.5		2.12.01.3.11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2	7.152.000	1	3.576.000	1	3.576.000	0	0	0	0	2	7.152.000	100,00%	100,00%	
15		2.12.01.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-					9	116.280.000	1	2860000	4	52.650.100	0	0	0	0	5	55.510.100	55,00%	49,03%	
1.5.1		2.12.01.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					5	82.990.000	1	2.860.000	2	35.325.900	0	0	0	0	3	38.185.900	60,00%	46,01%	
1.5.2		2.12.01.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					4	33.290.000	0	0	2	17.324.200	0	0	0	0	2	17.324.200	50,00%	52,04%	
16		2.12.01.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-					15	410.736.000	2	48814185	4	84.037.497	0	0	0	0	6	132.851.682	16,67%	246,77%	
1.6.1		2.12.01.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1	3.000.000	0	19.556.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	20.556.000	0,00%	685,20%	
1.6.2		2.12.01.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12	276.000.000	2	28.258.185	4	47.703.497	0	0	0	0	6	75.961.682	50,00%	27,52%	
1.6.3		2.12.01.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					2	131.736.000	0	1.000.000	0	35.334.000	0	0	0	0	0	36.334.000	0,00%	27,58%	
														Rata- Rata Capaian Kinerja								
														Predikat Kinerja								
2	â€¢ Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima Dengan Indikator Pembangunan Yakni Indeks	2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan Dokumen Kependudukan						234.354.200		37.800.000		145.740.000		0		0		183.540.000	37,50%	86,74%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	Kepuasan Masyarakat Dan Persentase Penerapan E-Government																					
21		2.12.02.1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-					12	196.254.200	0	0	6	145.740.000	0	0	0	0	6	145.740.000	50,00%	74,26%	
2.1.1		2.12.02.1.1	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk					12	196.254.200	0	0	6	145.740.000	0	0	0	0	6	145.740.000	50,00%	74,26%	
22		2.12.02.2	Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-					4	38.100.000	1	37800000	0	-	0	0	0	0	1	37.800.000	25,00%	99,21%	
2.2.1		2.12.02.2.1	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk					4	38.100.000	1	37.800.000	0	-	0	0	0	0	1	37.800.000	25,00%	99,21%	
Rata- Rata Capaian Kinerja																						
Predikat Kinerja																						
3	â€¢ Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima Dengan Indikator Pembangunan Yakni Indeks Kepuasan Masyarakat Dan Persentase Penerapan E-Government	2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Dokumen Pencatatan Sipil						50.570.400		20.974.800		10.308.000		0		0		31.282.800	100,00%	61,86%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
31		2.12.03.1	Pelayanan Pencatatan Sipil	-					4	50.570.400	4	20974800	0	10.308.000	0	0	0	0	4	31.282.800	100,00%	61,86%	
3.1.1		2.12.03.1.1	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan					4	50.570.400	4	20.974.800	0	10.308.000	0	0	0	0	4	31.282.800	100,00%	61,86%	
Rata- Rata Capaian Kinerja																						
Predikat Kinerja																						

4	â€¢ Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima Dengan Indikator Pembangunan Yakni Indeks Kepuasan Masyarakat Dan Persentase Penerapan E-Government	2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data Informasi Administrasi Kependudukan						372.976.200		60.000.000		90.000.000		0		0		150.000.000	62,50%	20,83%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41		2.12.04.1	Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan	-					5	12.976.200	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0,00%	0,00%	
4.1.1		2.12.04.1.1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan					5	12.976.200	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0,00%	0,00%	
42		2.12.04.2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-					4	360.000.000	2	60000000	3	90.000.000	0	0	0	0	5	150.000.000	125,00%	41,67%	
4.2.1		2.12.04.2.1	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					4	360.000.000	2	60.000.000	3	90.000.000	0	0	0	0	5	150.000.000	125,00%	41,67%	
Rata- Rata Capaian Kinerja																						
Predikat Kinerja																						

2.2 Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan /program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitaas dan kualitas yang terukur.

Analisis kerja adalah suatu kegiatan untuk menelaah keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang dilakukan apakah berhasil atau tidak untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari program / kegiatan yang dilaksanakan.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara

No	Program/ Kegiatan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Program Pendaftaran Penduduk		Perekaman KTP elektronik	95%	97%	98%	94%	94,89	96,52%	98%	94%	
2	Program Pendaftaran Penduduk		Persenatse anak usia 0-17 tahun kuran 1 hari yang memiliki KIA	30%	40%	50%	40%	30,32	31,96%	50%	40%	
3	Program Pencatatan Sipil		Kepemilikan akta kelahiran	95,5%	96%	97%	93%	92,53	93,61%	97%	93%	
4	Program Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja	5 OPD	5 OPD	5 OPD	5 OPD	0 OPD	5 OPD	5 OPD	5 OPD	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi OPD

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi OPD. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan OPD. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Meskipun tingkat pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target Renstra periode yang lalu hasilnya cukup bagus, namun berdasarkan kajian hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara, khususnya pada kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan selama ini, dapat diidentifikasi isu-isu penting sebagai berikut :

1. Adanya penduduk Kabupaten Padang Lawas Utara yang tinggal di luar Kabupaten Padang Lawas Utara bahkan di luar pulau Sumatera dan di Luar Negeri sehingga tidak bisa hadir untuk melaksanakan rekam KTP elektronik.
2. Masih adanya pemahaman masyarakat yang kurang sadar mengurus langsung dokumen kependudukannya disaat mengalami peristiwa penting ataupun kependudukan seperti kelahiran bayi tidak langsung mengurus akta kelahiran dan perubahan data karena perkawinan, kematian dan perceraian (update data).
3. Masih adanya masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara hanya membuat surat keterangan kelahiran dari tempat melahirkan dan surat keterangan kematian dari desa.
4. Masih kurang pahamnya orangtua akan pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak sehingga banyak orangtua tidak melengkapi berkas (syarat) pembuatan KIA ketika Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara melakukan pelayanan ke sekolah – sekolah.
5. Masih munculnya permasalahan NIK dan data bermasalah seperti data ganda/anomaly.
6. Ketersediaan Blangko, alat cetak serta tinta KTP elektronik dan KIA yang masih kurang mencukupi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah penjabaran dari RPD Kabupaten Padang lawas Utara. Telaahan teradap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD,dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan.

Tahapan kegiatan telahaan yang dilakukan, adalah:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam RKPD;
2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Menyajikan dalam bentuk matrik tabel, dengan menempatkan program/kegiatan yang sama pada garis yang sama untuk memudahkan analisis;
4. Melakukan pengecekan apakah program/kegiatan yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas OPD sudah termuat dalam rancangan awal RKPD. Jika belum termuat, maka perlu dibuatkan catatan penting;
5. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
6. Untuk jenis program dan kegiatan yang sesuai, telah dilakukan langkah berikut:
    a. Mengecekan apakah indikator kinerjanya sesuai, jika tidak sesuai, tentukan indikator yang akan dipilih;
    b. Meneliti besaran tolok ukur atau target capaian program/kegiatan, bila terdapat perbedaan, maka kaji kembali besaran tersebut dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif, target capaian renstra OPD, serta ketersediaan sumber dana lainnya; dan
    c. Memberikan catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja OPD.
7. Untuk jenis program dan kegiatan yang tidak sesuai (berbeda), telah dilakukan langkah berikut:
    a. Untuk program dan kegiatan yang hanya terdapat di dalam RKPD, maupun yang hanya terdapat dalam identifikasi kebutuhan hasil analisis, melakukan pengecekan apakah masih layak untuk direncanakan, dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata, sasaran target Renstra OPD, kebijakan nasional, pencapaian visi-misi kepala daerah, dan ketersediaan pendanaan;
    b. Meneliti kembali kemudian tentukan indikator yang akan dipilih;
    c. Meneliti kembali kemudian tentukan besaran tolok ukur atau target capaian program dan kegiatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif berdasarkan arahan rancangan awal RKPD, target capaian Renstra OPD, serta ketersediaan sumber dana lainnya;

d. Memberikan catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja OPD.

Merumuskan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan dapat dilihat dari Tabel II.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Padang Lawas Utara

OPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)	
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9	-10		-11	-12
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Kabupaten Padang Lawas Utara**	**persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota**	**100**	**%**	**3.148.866.133**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Padang Lawas Utara**	**persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota**	**100**	**%**	**3.322.863.257**	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kabupaten Padang Lawas Utara**	**Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3**	**Keg**	**3.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kabupaten Padang Lawas Utara**	**Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3**	**Keg**	**8.829.400**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Padang Lawas Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dok	1.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Padang Lawas Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dok	3.912.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Padang Lawas Utara	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	2	Dok	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Padang Lawas Utara	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	2	Dok	3.667.600	

			SKPD						SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Padang Lawas Utara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Lap	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Padang Lawas Utara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Lap	1.249.600	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kabupaten Padang Lawas Utara**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2**	**Keg**	**2.566.446.133**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kabupaten Padang Lawas Utara**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2**	**Keg**	**2.558.676.257**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Padang Lawas Utara	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21	OB	2.412.006.133	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Padang Lawas Utara	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21	OB	2.404.236.257	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Padang Lawas Utara	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	Dok	154.440.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Padang Lawas Utara	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	Dok	154.440.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kabupaten Padang Lawas Utara**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**3**	**Keg**	**7.500.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**kabupaten Padang Lawas Utara**	**Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**6**	**Keg**	**106.359.600**	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Padang Lawas Utara	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	Paket	500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Padang Lawas Utara	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	Paket	3.210.200	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Padang Lawas Utara	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	Paket	5.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Padang Lawas Utara	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	Paket	86.789.400	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Padang Lawas Utara	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	Paket	2.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Padang Lawas Utara	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	Paket	16.360.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Padang Lawas Utara	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	0	Dok	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Padang Lawas Utara	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	0	Dok	0	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Padang Lawas Utara	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	0	Lap	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Padang Lawas Utara	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2	Lap	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kabupaten Padang Lawas Utara**	**Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**3**	**Keg**	**528.500.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kabupaten Padang Lawas Utara**	**Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**3**	**Keg**	**529.998.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Padang Lawas Utara	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4	Lap	500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Padang Lawas Utara	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1	Lap	2.000.000	

	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Kabupaten Padang Lawas Utara	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	4	Lap	276.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Kabupaten Padang Lawas Utara	Jumlah laporan enyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	4	Lap	275.998.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Padang Lawas Utara	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Lap	252.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Padang Lawas Utara	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Lap	252.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Padang Lawas Utara**	**Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2**	**Keg**	**43.420.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Padang Lawas Utara**	**Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2**	**Keg**	**119.000.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Padang Lawas Utara	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5	unit	38.420.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Padang Lawas Utara	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5	unit	82.990.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Padang Lawas Utara	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5	Unit	5.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Padang Lawas Utara	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5	Unit	36.010.000	
	Program Pendaftaran Penduduk	**Kabupaten Padang Lawas Utara**	**Persentase Cakupan Dokumen Kependudukan**	**100**	**%**	**6.724.000**	**Program Pendaftaran Penduduk**	**Kabupaten Padang Lawas Utara**	**Persentase Cakupan Dokumen Kependudukan**	**100**	**%**	**12.047.000**	

	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**Kabupaten Padang Lawas Utara**	**Persentase Cakupan Perekaman KTP**	**98**	**%**	**5.724.000**	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Kabupaten Padang Lawas Utara**	**Persentase Cakupan Perekaman KTP**	**98**	**%**	**7.697.000**	
	Peningkatan pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Padang Lawas Utara	Jumlah Laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	12	Lap	5.724.000	Peningkatan pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Padang Lawas Utara	Jumlah Laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	12	Lap	7.697.000	
	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	**Kabupaten Padang Lawas Utara**	**Persentase Cakupan Kartu Keluarga**	**98**	**%**	**1.000.000**	**Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Kabupaten Padang Lawas Utara**	**Persentase Cakupan Kartu Keluarga**	**98**	**%**	**4.350.000**	
	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Padang Lawas Utara	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	0	Lap	1.000.000	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kabupaten Padang Lawas Utara	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	4	Lap	4.350.000	
	Program Pencatatan Sipil	**Kabupaten Padang Lawas Utara**	**Persentase Cakupan Dokumen Pencatatan Sipil**	**100**	**%**	**1.000.000**	**Program Pencatatan Sipil**	**Kabupaten Padang Lawas Utara**	**Persentase Cakupan Dokumen Pencatatan Sipil**	**100**	**%**	**12.780.000**	
	Pelayanan Pencatatan Sipil	**Kabupaten Padang Lawas Utara**	**Persentase Cakupan Akta kelahiran**	**97**	**%**	**1.000.000**	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Kabupaten Padang Lawas Utara**	**Persentase Cakupan Akta kelahiran**	**97**	**%**	**12.780.000**	
	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Kabupaten Padang Lawas Utara	Jumlah Layanan pencatatan Sipil yang ditingkatkan	4	Layanan	1.000.000	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Padang Lawas Utara	Jumlah Layanan pencatatan Sipil yang ditingkatkan	4	Layanan	12.780.000	

	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Kabupaten Padang Lawas Utara**	**Persentase Pemanfaatan Data Informasi Administrasi Kependudukan**	**100**	**%**	**1.000.000**	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Kabupaten Padang Lawas Utara**	**Persentase Pemanfaatan Data Informasi Administrasi Kependudukan**	**100**	**%**	**2.130.000**	
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	**Kabupaten Padang Lawas Utara**	**Jumlah kegiatan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan**	**1**	**Keg**	**1.000.000**	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Kabupaten Padang Lawas Utara**	**Jumlah kegiatan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan**	**1**	**Keg**	**2.130.000**	
	Pengolahan dan Penyajian Data	Kabupaten Padang Lawas Utara	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	2	dok	1.000.000	Pengolahan dan Penyajian Data	Kabupaten Padang Lawas Utara	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	1	dok	2.130.000	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Kabupaten Padang Lawas Utara**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**0**	**Keg**	**0**	**Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur**	**Kabupaten Padang Lawas Utara**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**0**	**Keg**	**0**	
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kabupaten Padang Lawas Utara	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	0	Lap	0	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kabupaten Padang Lawas Utara	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	0	Lap	0	
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan	Kabupaten Padang Lawas Utara	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan	0	Lap	0	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan	Kabupaten Padang Lawas Utara	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan	0	Lap	0	

	Masyarakat		Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				Masyarakat		Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 dilakukan untuk membandingkan Rancangan Awal (Renstra) terhadap analisis kebutuhan setelah diadakan musyawarah antar OPD dengan pemangku kepentingan dan menginagt kebutuhan sarana dan prasaran yang harus terpenuhi untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Pada rancangan awal rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2024 memiliki anggaran sebesar Rp 3.157.590.133,- dengan analisa kebutuhan sebesar Rp 3.349.820.257,-.

2.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten yang langsung ditujukan kepada OPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD kabupaten, dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten (bila sudah dilakukan).

Langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menginventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat;
2. Menyesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku;
3. Meneliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan;
4. Bila belum lengkap lakukan konfirmasi (kalau memungkinkan), atau beri catatan untuk dikonfirmasikan dengan hasil analisis kebutuhan oleh OPD kabupaten;
5. Memeriksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD kabupaten; dan
6. Membuat rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD kabupaten.

Akan tetapi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara belum mempunyai usulan para pemangku kepentingan, baik dari

kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Padang Lawas Utara
Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
					L
				I	
			H		
		I			
	N				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN OPD

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak terdapat realisasi kinerja yang mengacu pada Standar Nasional/Lainnya dikarenakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bukan melaksanakan urusan wajib sehingga tidak melaksanakan SPM ataupun Standar Nasional lainnya.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja, tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah ditetapkan sebagai tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara. Tujuan yang tertuang dalam Renstra Tahun 2024-2026 Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara harus dicapai melalui programdan kegiatan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara konsisten dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang secara kolektif menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya tersebut. Adapun tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan sesuai tabel 3.2 yaitu :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Padang Lawas Utara
Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun		
			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Akip Disdukcapil	67,42 Poin	72,42 Poin	77,42 Poin
		Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Poin	87 Poin	89 Poin
		Persentase Dokumen dalam Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Diterbitkan	80%	82,50%	84,25%

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan dengan anggaran Rp 3.322.863.257,- dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Padang Lawas Utara.

Program dan kegiatan rencana kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
7			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
13		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
14			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
15			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

16		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Peizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
17			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
18	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
19		Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
20	Program Pencatatan Sipi	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
21	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
22		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
23			Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat

Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara, yaitu:

TABEL 3.4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara

N	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**3.349.820.257,00**							**3.321.695.893,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.349.820.257,00**							**3.321.695.893,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**3.349.820.257,00**							**3.321.695.893,00**	
1,	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai AKIP***	**BB Predikat**			**CC Predikat**	**3.322.863.257,00**						**B Predikat**	**3.312.971.893,00**	

	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	3 Kegiatan			3 Kegiatan	8.829.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara	3 Kegiatan	2.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	3.912.200,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara	2 Dokumen	1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	3.667.600,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara	2 Dokumen	1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan			4 Laporan	1.249.600,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara	4 Laporan	500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	2 Kegiatan			2 Kegiatan	2.558.676.257,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara	2 Kegiatan	2.730.551.893,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan			21 Orang/bulan	2.404.236.257,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara	21 Orang/bulan	2.576.111.893,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen			12 Dokumen	154.440.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara	12 Dokumen	154.440.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	5 Kegiatan			3 Kegiatan	106.359.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara	4 Kegiatan	10.900.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	3.210.200,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara	4 Paket	900.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	86.789.400,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara	4 Paket	5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	16.360.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara	2 Paket	2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			0 Laporan	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara	12 Laporan	3.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	3 Kegiatan			3 Kegiatan	529.998.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara	3 Kegiatan	528.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan			4 Laporan	2.000.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara	4 Laporan	600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan			4 Laporan	275.998.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara	4 Laporan	276.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	252.000.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara	12 Laporan	252.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	2 Kegiatan			2 Kegiatan	119.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara	2 Kegiatan	40.420.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit			5 Unit	82.990.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara	5 Unit	38.420.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit			5 Unit	36.010.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara	5 Unit	2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2,	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	***Persentase Cakupan Dokumen Kependudukan***	**74 Persen 74 Persen**			**68 Persen**	**12.047.000,00**						**71 Persen 71 Persen**	**6.724.000,00**	
	2.12.02.2 .01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk*	1 Kegiatan			1 Kegiatan	7.697.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara	1 Kegiatan	5.724.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2 .01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan			12 Laporan	7.697.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara	12 Laporan	5.724.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk*	1 Kegiatan			1 Kegiatan	4.350.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara	1 Kegiatan	1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.04.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Pembinaandan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	12 Laporan			12 Laporan	4.350.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara	12 Laporan	1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	***Persentase Cakupan Dokumen Pencatatan Sipil***	**96 Persen 96 Persen**			**94 Persen**	**12.780.000,00**						**95 Persen 95 Persen**	**1.000.000,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Jumlah Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil*	1 Kegiatan			1 Kegiatan	12.780.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara	1 Kegiatan	1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil														

			Jumlah Layanan PencatatanSipil yang Ditingkatkan	4 Layanan			4 Layanan	12.780.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara	4 Layanan	1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	***Persentase Pemanfaatan Data Informasi Administrasi Kependudukan***	**60 Persen**			**36 Persen**	**2.130.000,00**						**48 Persen**	**1.000.000,00**	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Jumlah Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan*	1 Kegiatan			1 Kegiatan	2.130.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara	1 Kegiatan	1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1 Dokumen			2 Dokumen	2.130.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Padang Lawas Utara	1 Dokumen	1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	JUMLAH							**3.349.820.257,00**							**3.321.695.893,00**	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 serta Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026;
2. Mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Dalam hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki peran dalam pencapaian tujuan "Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil" serta 2 (dua) sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil" dan "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil";
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara;
2. Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara ini berpedoman pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara;
3. Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara dan Evaluasi Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara; dan

6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dengan disusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun anggaran 2024.

Gunungtua, 31 Agustus 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

MUHAMMAD ALI HASIBUAN, S.Sos
NIP. 19720512 199203 1 005